

EFEKTIVITAS PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR

Arwiny Ramadhani

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

Ismail

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Jl. A.P. Pettarani Kampus UNM Gunung Sari Baru Makassar

ABSTRAK

Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Dibimbing oleh Bapak Ismail, S.Pd., M.Si., dan Ibu Dr. Hj. A. Aslinda, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan kawasan permukiman kumuh dilihat dari Ketepatan penentuan waktu, Ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan dalam pengukuran, Ketepatan dalam menentukan pilihan, Ketepatan berpikir, Ketepatan dalam melakukan perintah, Ketepatan dalam menentukan tujuan, Ketepatan sasaran di Kecamatan Tamalate. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan fokus penelitian di Wilayah Kecamatan Tamalate Kota Makassar dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data hasil penelitian yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan penanganan kawasan kumuh di Kecamatan Tamalate sudah efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dengan melihat indikator Ketepatan penentuan waktu, Ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan dalam pengukuran, Ketepatan dalam menentukan pilihan, Ketepatan berpikir, Ketepatan dalam melakukan perintah, Ketepatan dalam menentukan tujuan, dan Ketepatan sasaran. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penanganan Kawasan Kumuh di Kecamatan Tamalate Kota Makassar sudah efektif. Hal ini perlu diperhatikan agar Pemerintah Daerah terus berusaha meningkatkan kualitas wilayah kumuh di Kecamatan Tamalate

Kata Kunci : Efektivitas, Penanganan, Kawasan Kumuh

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bagi kota yang padat penduduknya, penambahan penduduk tiap tahun jauh melampaui penyediaan kesempatan kerja di dalam wilayahnya, sehingga dirasakan menambah berat tekanan permasalahan di kota-kota besar. Tekanan ekonomi dan keterdesakan akan tempat tinggal bagi kaum pinggiran (*slum area*), hingga membentuk lingkungan permukiman kumuh.¹

Kota Makassar menjadi salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia, kota yang memiliki luas 199.3 km² dengan jumlah penduduk 1,671,001 jiwa² ini telah menunjukkan diri sebagai kota metropolitan yang mampu bersaing dengan kota-kota besar di pulau Jawa. Banyaknya fasilitas-fasilitas yang dibuat seperti *mall*, wisata laut, dan juga dijadikan sebagai pusat bisnis ini tentunya tidak dapat terjadi bila Pemerintah tidak turut campur di dalamnya untuk membangun kota Makassar.

Kelebihan yang dimiliki oleh kota metropolitan di Indonesia yang semakin maju tentunya memiliki dampak di balik modernnya kota ini. Semakin maju kotanya maka semakin banyak pula permasalahan yang muncul. Semakin tinggi bangunan yang menjulang maka semakin banyak pula wilayah kumuh di sekitarnya. Hal ini terbukti dengan jumlah permukiman kumuh yang ada.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar No 050. 05/1341/ Kep/05/2014 Tentang Penetapan Lokasi Kumuh Kota Makassar Tahun Anggaran 2014, bahwa telah tercatat 103 kelurahan yang termasuk wilayah kumuh dari 143 kelurahan.³

Sebanyak 432.115 jiwa atau 131.299 kepala keluarga (kk) dari total penduduk kota Makassar yang menetap dalam kawasan permukiman kumuh. Luasan kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar diklasifikasikan ke dalam kategori kumuh berat, kumuh sedang dan kumuh ringan. Kumuh berat terdapat di 36 kelurahan, kategori kumuh sedang di 49 kelurahan dan 17 kelurahan masuk kategori kumuh ringan.⁴

Kecamatan Tamalate merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar yang terdiri dari 10 Kelurahan yaitu Kelurahan Barombong, Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Jongaya, Bungaya, Pa'baeng-baeng, Mannuruki, Parang Tambung dan Mangasa.

Adapun kelurahan yang termasuk wilayah kumuh berat yang ada di Kecamatan Tamalate yaitu kelurahan Mangasa, Parang Tambung, Tanjung Merdeka, Barombong dan Maccini Sombala⁵.

Pentingnya penanganan permasalahan lingkungan salah satunya adalah penanganan permukiman kumuh, sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Undang-

¹ Rahardjo Adisasmita. 2010. *Pembangunan Kota Optimum, Efisiensi & Mandiri*. Yogyakarta: Graha Ilmu, Hlm. 118

² Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar

³ Surat Keputusan Walikota Makassar No 050. 05/1341/ Kep/05/2014 Tentang Penetapan Lokasi Kumuh Kota Makassar Tahun Anggaran 2014

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa perencanaan kawasan permukiman harus mencakup (a) peningkatan sumber daya perkotaan atau pedesaan; (b) mitigasi bencana; (c) penyediaan atau peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum.⁶

Berdasarkan hasil observasi sebelumnya peneliti menemukan ketidaksesuaian realita dengan informasi dari media dalam hal ini Makassarmetro.com (2017) yang mempublikasikan bahwa progres penanganan dan pengurangan luasan kumuh telah mencapai 60 persen⁷. Namun nyatanya masih terlihat bahwa di Kecamatan Tamalate yang termasuk kumuh berat masih memiliki jalanan yang rusak, adanya penumpukan sampah dan drainase yang rusak.

Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui efektif tidaknya penanganan yang dilakukan pemerintah pada kawasan permukiman kumuh di kecamatan Tamalate. Hal tersebut mendorong penulis untuk menyusun proposal dengan judul *Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tamalate Kota Makassar*.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka adapun rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penanganan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Tamalate Kota Makassar?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penanganan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Tamalate Kota Makassar

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

a. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam menganalisis dan menilai penanganan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Tamalate Kota Makassar

b. Manfaat praktis

Bagi instansi yang berkaitan dengan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah di Wilayah Kecamatan Tamalate dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Efektivitas

Berdasarkan Ensiklopedi Umum Administrasi (1979) dalam Mutiarin (2014: 95), efektivitas berasal dari kata kerja efektif, berarti terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena mungkin hasil dicapai dengan penghamburan material, juga berupa pikiran, tenaga, waktu, maupun benda lainnya. Suatu

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

⁷ Makassarmetro. *Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Makassar Capai 60 Persen*. 16 Desember 2017. <http://makassarmetro.com/2017/12/16/penanganan-kawasan-pemukiman-kumuh-kota-makassar-capai-60-persen/>

yang efektif belum tentu efisien, demikian juga sebaliknya suatu yang efisien belum tentu efektif. Dengan demikian istilah efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar dan sesuai serta dengan cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan efisien adalah hasil dari usaha yang telah dicapai lebih besar dari usaha yang dilakukan.⁸

The Liang Gie dalam Mutiarin (2014: 97): Efektivitas merupakan keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud sebagaimana yang dikehendaki⁹

Makmur (2011: 7) berpendapat bahwa dari segi kriteria efektivitas, unsur-unsurnya antara lain, 1) Ketepatan waktu, 2) Ketepatan perhitungan, 3) Ketepatan dalam pengukuran, 4) Ketepatan dalam menentukan pilihan, 5) Ketepatan berpikir, 6) Ketepatan dalam melakukan perintah, 7) Ketepatan dalam menentukan tujuan, dan 8) Ketepatan sasaran.¹⁰

a. Ketepatan Penentuan waktu

Sebagaimana kita maklumi bahwa waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Penggunaan waktu

yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

b. Ketepatan perhitungan biaya

Ketepatan dalam pemanfaatan biaya terhadap suatu kegiatan, dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan sampai kegiatan itu dapat diselesaikan

c. Ketepatan dalam pengukuran

Ketepatan ukuran yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas yang dipercayakan kepada kita adalah merupakan bagian dari keefektivitasan

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Kesalahan dalam memilih suatu pekerjaan, metode, benda, sahabat, pasangan, dan lain sebagainya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidakefektivan serta kemungkinan menciptakan penyesalan di kemudian hari

e. Ketepatan berpikir

Kelebihan manusia satu dengan manusia lainnya sangat tergantung pada ketepatan berpikirnya, karena ketepatan berpikir dari berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan diri sendiri maupun pada alam semesta yang memberikan pengaruh yang sifatnya positif maupun negative

f. Ketepatan dalam melakukan perintah

Jika perintah yang diberikan kepada bawahan yang tidak dapat dimengerti atau dipahami, maka pelaksanaan perintah tersebut dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam

⁸ Dyah Mutiarin & Arif Zainudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 95

⁹ Ibid. Hlm. 97

¹⁰ Makmur. 2011. *Efektivitas Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm. 7

pelaksanaannya serta akhirnya akan merugikan organisasi bersangkutan

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Tujuan menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun organisasi yang dimiliki oleh masyarakat tertentu. Tujuan berorientasi pada jangka panjang

h. Ketepatan sasaran

Sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek. Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi

2. Permukiman Kumuh

a. Definisi Permukiman Kumuh

Menurut Mulyono (2009: 134), permukiman merupakan suatu kelompok rumah hunian pada suatu areal atau wilayah beserta prasarana yang ada di dalamnya. Bentuk permukiman dapat berupa kelompok rumah, kampung, atau wilayah permukiman yang luas.¹¹

Definisi permukiman juga tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018, bahwa:

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan

Perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.¹²

Sifat dan karakter suatu permukiman biasanya lebih kompleks karena permukiman mencakup suatu batasan wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan luas dan ruang lingkup perumahan. Biasanya suatu perumahan hanya dikelola oleh suatu pengembangan di bawah koordinasi pemerintah, sedangkan pengelolaan sebuah permukiman biasanya langsung ditangani oleh pemerintah dan konsep dan rencana pengembangannya sudah ditentukan dalam bentuk konsep pengembangan wilayah secara makro melalui RUTRK, RDTRK, maupun RTRK.¹³

Parsudi dalam Adisasmita (2010: 118) menyatakan bahwa: Kumuh atau *slum*, adalah permukiman atau perumahan orang-orang miskin kota yang berpenduduk padat, terdapat lorong-lorong yang kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan, juga biasa disebut dengan wilayah pencomberan (*semrawut*).¹⁴

¹¹ Mulyono Sadyohutomo. 2009. *Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 134

¹² Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018.

¹³ Suparno Sartra, Endy Marlina. 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta: Andi Offset. Hlm. 37-38

¹⁴ Rahardjo Adisasmita. Op. Cit. Hlm. 118

b. Faktor Terjadinya Permukiman Kumuh

Menurut Mulyono (2009: 135) terdapat beberapa faktor penyebab munculnya permukiman kumuh

- 1) Petumbuhan penduduk kota yang tinggi, tidak diimbangi dengan tingkat kepadatan yang cukup
- 2) Keterlambatan pemerintah kota dalam merencana dan membangun prasarana (terutama jalan) pada daerah perkembangan permukiman baru.¹⁵

c. Ciri-Ciri Permukiman Kumuh

Menurut Adisasmita (2010: 119) pengertian lingkungan permukiman kumuh secara umum di perkotaan yakni:

- 1) Dari Segi Fisik

Pada umumnya ukuran persil dan tanah sempit serta di bawah standar dalam arti rasio luas ruang tempat tinggal per satu jiwa sangat rendah, pola penggunaan tanah tak teratur, letak dan bentuk bangunan tidak teratur, prasarana fisik lingkungan seperti air minum, drainase, air limbah dan sampah di bawah standar.

- 2) Dari Segi Sosial

Lingkungan yang dihuni oleh sejumlah penduduk yang padat dalam area terbatas. Tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat rata-rata rendah, hubungan antara individu lebih menonjol, kegotongroyongannya relatif lebih kuat dibanding masyarakat kota lainnya.

- 3) Dari Segi Hukum

Sebagian besar kawasan kumuh umumnya terbentuk tanpa melalui prosedur perundang-undangan yang ada, hal ini disebabkan karena langka dan mahal nya tanah di perkotaan.

- 4) Dari Segi Ekonomi

Tingkat keinginan menabung penduduk umumnya rendah karena tingkat pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁶

C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiarto (2015: 8) penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistic-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci.¹⁷

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Menurut Himawati (2017: 88), penelitian deskriptif merupakan penelitian bukan eksperimen, karena tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan “apa adanya”

¹⁵ Mulyono. Op.cit. Hlm. 135

¹⁶ Rahardjo Adisasmita. Op. cit. Hlm. 119

¹⁷ Eko Sugiarto. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media. Hlm. 8

tentang sesuatu variable, gejala, atau keadaan.¹⁸

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mangasa, Parang Tambung dan Maccini Sombala sebagai perwakilan dari lima kelurahan yang termasuk wilayah kumuh berat di Kecamatan Tamalate. Alasan pemilihan lokasi ini karena kecamatan Tamalate termasuk dalam kecamatan kumuh yang terdapat di Kota Makassar.

3. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka konsep. Adapun fokus penelitian ini menggunakan teori dari Makmur (2011: 7) dengan dimensi sebagai berikut:

a. Ketepatan Penentuan waktu

Ketepatan pemerintah dalam menangani kawasan kumuh harus sesuai dengan rencana awal berupa pembangunan dan perbaikan wilayah kumuh, juga waktu yang ditentukan pemerintah dalam penanganannya dilaksanakan dengan memikirkan resiko yang akan datang

b. Ketepatan perhitungan biaya

Kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan dana yang disediakan kemudian digunakan dalam membangun kawasan kumuh

c. Ketepatan dalam pengukuran

Kemampuan pemerintah dalam menentukan skala prioritas wilayah yang dijadikan lokasi perbaikan dan penanganan

d. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Pemerintah perlu memikirkan metode atau cara apa yang akan

mereka gunakan dalam menangani kawasan kumuh dan juga menentukan apa saja yang perlu dilakukan perbaikan

e. Ketepatan berpikir

Kemampuan pemerintah dalam merencanakan penanganan atau proses perbaikan kawasan permukiman kumuh secara matang untuk menghindari resiko kegagalan pelaksanaan

f. Ketepatan dalam melakukan perintah

Kemampuan aparat pemerintah dalam melaksanakan penanganan kawasan kumuh berdasarkan perintah dari pemerintah yang berwenang

g. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Mampu menetapkan tujuan yang menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan penanganan

h. Ketepatan sasaran

Pemerintah perlu memperhatikan apa yang perlu dan *urgent* ditangani dalam perbaikan wilayah kumuh dan apa yang tidak perlu sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.

4. Tahap-Tahap Penelitian

Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tahap pra penelitian

Pada tahap ini dilakukan observasi serta wawancara awal untuk memberikan permasalahan yang akan diteliti dan menentukan lokasi penelitian. Setelah itu, peneliti menyusun proposal penelitian untuk diajukan sebagai persyaratan untuk melakukan penelitian. Adapun proposal yang telah disetujui oleh jurusan digunakan untuk mengurus

¹⁸ Fenti Hikmawati. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. Hlm. 88

perizinan kepada lembaga terkait untuk melakukan penelitian.

b. Tahap penelitian

Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data baik berupa wawancara observasi dan dokumentasi yang merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan analisis data penarikan kesimpulan.

c. Tahap akhir

Dalam tahap ini data-data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis serta dilakukan penarikan kesimpulan. Dari hasil tersebut disusun sebuah laporan skripsi berdasarkan aturan penelitian yang ditetapkan oleh Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Makassar.

5. Informan

Untuk memperoleh data secara representatif, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Adapun informan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Makassar
2. Satuan Kerja PIP (Pembangunan Infrastruktur Permukiman)
3. Kantor Camat Tamalate
4. Kantor Kelurahan Mangasa, Parangtambung, dan Mannuruki
5. Masyarakat yang menempati kawasan kumuh (RT/RW)

6. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer

Menurut Hikmawati (2017: 33), data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁹ Adapun data yang didapatkan berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan pada responden yaitu kepala keluarga yang menempati wilayah tersebut dan pemerintah yang bersangkutan. Tujuan yang ingin dicapai adalah apakah penanganan kawasan permukiman kumuh di kecamatan Tamalate telah efektif.

b. Data Sekunder

Menurut Hikmawati (2017: 13), data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti lewat orang lain atau dokumen²⁰. Dimana data sekunder diperoleh di berbagai media seperti majalah, koran, buku, jurnal dan dokumentasi lain yang berhubungan dengan penelitian Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tamalate.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen
- b. Observasi
- c. Teknik Wawancara
- d. Teknik Triangulasi

8. Instrumen Penelitian

Nasution dalam Sugiyono (2013: 223) mengatakan dalam metode penelitian tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama.²¹ Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrument pokok dan instrument penunjang. Instrumen pokok adalah

¹⁹ Ibid. Hlm. 33

²⁰ Ibid. Hlm. 33

²¹ Ibid. Hlm. 223

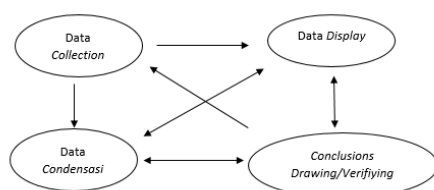
peneliti itu sendiri sedangkan instrument penunjang adalah handphone, ballpoint dan buku. Handphone digunakan untuk merekan kejadian yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto maupun video. Sedangkan untuk ballpoint dan buku untuk mencatat informasi yang penting dalam mengumpulkan data.

9. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014: 12) yaitu:

Menganalisis data dengan tiga langkah : kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkatan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*).²²

Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14) akan diterapkan sebagaimana berikut²³ :



Gambar 2 Miles, M.B & Huberman, A.M (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*, Sage Publication.

Sumber : Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14)

²² Matthew B. Miles, Michael Huberman & Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America: Arizona Atate University. Hlm. 12

²³ Ibid. Hlm. 14

D. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum Kecamatan Tamalate dan gambaran umum kawasan kumuh di kecamatan Tamalate.

a. Gambaran Umum Kawasan

Kumuh di Kecamatan Tamalate

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor 826/653.2/Tahun 2018 Tentang Revisi dan Verifikasi Lokasi Permukiman Kumuh di Kota Makassar Tahun Anggaran 2018, wilayah kumuh di Kecamatan Tamalate terbagi menjadi tiga kategori yang terdapat dalam table berikut:

Tabel 1. Luas dan Kategori Kumuh di Kelurahan Se-Kecamatan Tamalate

No	Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)	Kategori
1.	Jongaya	1.82	Sedang
2.	Tanjung Merdeka	18.61	Berat
3.	Balang Baru	16.31	Sedang
4.	Barombo	32.73	Berat

	ng		
5.	Maccini Sombala	8.53	Berat
6.	Mangasa	18.75	Berat
7.	Bongaya	5.72	Ringan
8.	Mannuru ki	4.16	Sedang
9.	Pa'Baeng -baeng	3.57	Sedang
10.	Parang Tambung	27.79	Berat
Total		137,99	

Sumber: Dokumen Peninjauan Kembali dan Update Kawasan Kumuh Kecamatan Tamalate 2018

Berdasarkan kedua tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pengurangan luas wilayah kumuh di Kecamatan Tamalate yaitu dari 181,59 Ha menjadi 137,99 Ha.

Berdasarkan pendataan yang telah dilakukan oleh tim Kotaku dan NUSP, maka format table akan mengikuti yang telah tersedia. Untuk proses memperbaharui pendataan akan disesuaikan pada kondisi pendataan lapangan yang akan dilakukan.

Penyajian Data dan Hasil Penelitian

1. Pembahasan

Setelah melakukan beberapa peninjauan secara ilmiah dan sistematis mengenai efektifitas penanganan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, maka diperoleh beberapa informasi sebagai berikut:

1. Ketepatan Penentuan Waktu

Berdasarkan konsep dari Makmur dengan hasil penelitian, ditemukan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara konsep dengan kondisi yang ditemukan. Hal ini dikarenakan meskipun

pelaksanaan proses penanganan telah diatur dalam juknis dan juklak namun waktu pelaksanaan dianggap kurang efektif disebabkan seringnya terjadi perubahan waktu pelaksanaan dan penyelesaian tergantung dari kondisi dan hambatan yang muncul dalam penanganannya.

2. Ketepatan Perhitungan Biaya

Dana dalam penanganan wilayah kumuh diperoleh dari APBD, Unicef, Bank Dunia, Program NUSP, dan Kotaku. Dana untuk tahun ini yaitu 24,8 milyar untuk 18 kelurahan dengan tujuh indikator penanganan kumuh sehingga 259 hektar yang tersisa untuk penanganan kumuh diharapkan dapat selesai, meskipun dana tersebut tidak hanya digunakan untuk penanganan kumuh karena masih banyak penanganan lain, tetapi dana dalam penanganan kumuh dianggap cukup efektif dikarenakan tahap pelaksanaan sudah mencapai 50 persen, selain itu meskipun banyak penanganan yang dilakukan pemerintah dengan jumlah dana APBD yang terbatas, pemerintah kota Makassar terus berusaha untuk melakukan *channeling* kepada pemerintah pusat maupun dari pihak luar untuk mendapatkan bantuan dana dalam penanganan.

3. Ketepatan dalam Pengukuran

Kecamatan Tallo, adapun kelurahan yang termasuk kumuh berat di Kecamatan Tamalate yaitu kelurahan Parangtambung, Mangasa, Maccini Sombala, Tanjung Merdeka, dan Barombong.

Penentuan skala prioritas penanganan sudah cukup efektif dikarenakan pemerintah yang melakukan penanganan pada wilayah kumuh kategori berat terlebih dahulu, akan tetapi menjadi suatu

kekhawatiran apabila wilayah kumuh sedang dan ringan berubah menjadi kumuh berat, sehingga pemerintah terus berusaha untuk melakukan pemerataan di setiap penanganannya.

4. Ketepatan dalam Menentukan Pilihan

Terdapat beberapa program penanganan wilayah kumuh yang dijalankan oleh pemerintah yaitu Kotaku, NUSP, PKH (Program Keluarga Harapan) dan beras restra. Program tersebut dianggap cukup efektif dikarenakan program yang dibuat oleh pemerintah cukup banyak untuk mengurangi luas wilayah kumuh walau pun program tersebut belum dilaksanakan di seluruh wilayah kumuh di Kecamatan Tamalate seperti di RT 7 Kelurahan Mangasa.

5. Ketepatan Berpikir

Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani kawasan kumuh disesuaikan dengan tujuh indikator kumuh misalnya meningkatkan kebersihan, pembangunan atau perbaikan drainase, paving blok dan pemasangan lampu, pencarian lahan baru bagi masyarakat yang menempati wilayah kumuh yang bersifat sengketa. Penanganan kumuh juga tidak hanya secara fisik atau infrastruktur tetapi juga perbaikan pola hidup bersih dan lingkungan masyarakat.

Hambatan yang terjadi dalam upaya penanganan kawasan permukiman kumuh yaitu tanah yang ditempati masyarakat adalah tanah ilegal, pembebasan lahan, permasalahan egosektoral yakni terpisahnya wewenang antara pemerintah kota dan pusat, dan juga tanah yang ditempati masyarakat

merupakan tanah pemerintah. Selain hambatan dari masyarakat, ada pula hambatan dari pemerintah itu sendiri, yaitu penanganan ataupun perbaikan yang dilakukan pemerintah dilakukan secara berulang di wilayah yang sama padahal nyatanya masih ada wilayah lain yang sama sekali belum mendapat penanganan. Meski begitu, upaya pemerintah dianggap cukup efektif, dikarenakan dari timbulkan hambatan-hambatan tersebut, pemerintah terus mengusahakan adanya solusi dari setiap masalah dalam penanganan kawasan kumuh.

6. Ketepatan dalam Melakukan Perintah

Prosedur atau tahap-tahap yang dilakukan dalam penanganan telah diatur oleh dokumen pemerintah. Awalnya kecamatan mengadakan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan) dimana tiap kelurahan mendata usulan wilayah dan program yang dianggap perlu untuk dilaksanakan, usulan tersebut berasal dari RT, RW atau tokoh masyarakat yang kemudian Dinas terkait akan menyesuaikan usulan masyarakat dengan anggaran dan dokumen SIAP (*Slum Improvement Action Plan*) yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan penanganan wilayah kumuh.

Peran stakeholder dalam hal ini di luar dari pemerintah juga dianggap cukup efektif dalam mendukung penanganan, selain pemerintah, ada pula Dewan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yaitu pihak swasta telah melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah untuk mengeluarkan sekian persen keuntungannya untuk

pembangunan Negara, salah satu contoh CSR yaitu Pegadaian, PT Semen Tonasa, Telkom, dan lain-lain, juga di luar dari pihak swasta, masyarakat juga dianggap sebagai stakeholder utama yang mendukung proses penanganan permukiman kumuh

7. Ketepatan dalam Menentukan Tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan diartikan bahwa pemerintah mampu menetapkan tujuan yang menjadi pedoman atau sebagai rujukan dari pelaksanaan kegiatan penanganan. Tujuan dari penanganan tersebut yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, penentuan tujuan dianggap cukup efektif dikarenakan terjadinya beberapa perubahan lingkungan wilayah kumuh ke arah yang lebih baik tetapi masih ada pula wilayah yang belum mendapat perbaikan seperti RT 7 Kelurahan Mangasa, RW 5 Kelurahan Maccini Sombala, dan di wilayah lainnya.

8. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran diartikan bahwa pemerintah perlu memperhatikan apa yang perlu dan *urgent* ditangani dalam perbaikan wilayah kumuh dan apa yang tidak perlu sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Penentuan sasaran dalam penanganan dianggap efektif, hal ini dikarenakan sasaran penanganan selalu dimulai pada perbaikan jalanan di lorong-lorong, di mana wilayah kumuh selalu terjadi di lorong-lorong.

Adapun kesimpulan Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tamalate Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tamalate Kota Makassar

Indikator Efektif	Kriteria	
	Efektif	Tidak Efektif
Ketepatan Penentuan Waktu		✓
Ketepatan Perhitungan Biaya	✓	
Ketepatan dalam Pengukuran	✓	
Ketepatan dalam Menentukan Pilihan	✓	
Ketepatan Berpikir	✓	
Ketepatan dalam Melakukan Perintah	✓	
Ketepatan dalam Menentukan Tujuan	✓	
Ketepatan Sasaran	✓	

Sumber : Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel kesimpulan efektivitas penanganan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Tamalate Kota Makassar sudah efektif, hal ini terlihat bahwa dari kedelapan indikator, hanya indikator pertama yakni Ketepatan Penentuan Waktu yang dianggap tidak efektif.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan kawasan kumuh cukup

efektif dikarenakan dari delapan indikator, terdapat satu indikator yang kurang efektif, enam indikator cukup efektif, dan satu indikator yang efektif, hal ini dalam dijelaskan dari beberapa hal berikut:

Ketepatan penentuan waktu masih kurang efektif, hal ini dibuktikan bahwa meskipun penanganan selalu diatur oleh juknis dan juklak, namun penanganan sering terjadi diluar dari waktu yang direncanakan karena terjadinya perubahan kondisi di lapangan.

Ketepatan dalam penentuan biaya cukup efektif, dibuktikan dengan jumlah APBD yang dianggarkan pemerintah kota dan usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan bantuan dana. Juga ketepatan pengukuran dalam hal ini skala prioritas pemerintah yang lebih mengutamakan penanganan pada wilayah kumuh berat dan tetap berusaha melakukan pemerataan penanganan. Kemudian dari ketepatan dalam pemilihan sudah cukup efektif karena banyaknya program yang dibuat pemerintah dalam menangani wilayah kumuh. Selain itu ketepatan berpikir juga cukup efektif karena upaya yang dilakukan pemerintah dan banyaknya solusi yang diberikan apabila terjadi hambatan dalam penanganannya. Ketepatan dalam menentukan perintah juga cukup efektif dikarenakan segala prosedur penanganan selalu dimulai dengan musyawarah rencana pembangunan untuk mengumpulkan segala usulan dari masyarakat, juga banyaknya stakeholder yang membantu menangani wilayah kumuh. Ketepatan menentukan tujuan juga

cukup efektif dikarenakan semua penanganan dilakukan atas dasar demi menyejahterakan masyarakat. Sedangkan ketetapan sasaran sudah efektif karena penanganan selalu dimulai dengan perbaikan lorong yang merupakan sumber munculnya wilayah kumuh.

b. Implikasi

Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya penanganan kawasan kumuh karena masyarakat merupakan aspek penting dalam suatu wilayah, dan tujuan dari suatu wilayah yaitu menyejahterakan masyarakatnya dengan mengurangi jumlah wilayah kumuh yang ada. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menangani wilayah kumuh di Kecamatan Tamalate Kota Makassar menjadi lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

c. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis merasa perlu memberikan saran yaitu pemerintah perlu lebih memperhatikan aspek ketepatan waktu, ketepatan biaya, ketepatan ukuran, ketepatan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan perintah, ketepatan tujuan, dan ketepatan sasaran dalam melakukan penanganan kawasan kumuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan Kota Optimum, Efisiensi & Mandiri*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Annas, Aswar. 2017. *Interaksi Pengambilan Keputusan dan*

- Evaluasi Kebijakan*. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Gaspersz, Vincent. 1996. *Ekonomi Manajerial (Pembuatan Keputusan Bisnis)*. Jakarta : Gramedia
- Hikmawati, Fenti. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Matthew B. Miles, Michael Huberman & Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America: Arizona Atate University.
- Mutiarin, Dyah & Arif Zaenudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sadyohutomo, Mulyono. 2009. *Manajemen Kota dan Wilayah Realita dan Tantangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Santoso, Urip. 2016. *Hukum Perumahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sartira, Suparno dan Endy Marlina. 2006. *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tika, Pabundu. 2014. *Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Artikel dan Jurnal**
- Data Jumlah Penduduk. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar
- Fajar Indonesia. 2016. 15 Lokasi Kumuh Masuk Program Kotaku.
<http://upeks.fajar.co.id/2016/11/24/15-lokasi-kumuh-masuk-program-kotaku/>
- Junaid, Resky. Penanganan Dan Pemeliharaan Dokumen. 25 Agustus 2017.
<http://rezkyamalia01.blogspot.com/2017/08/penanganan-dan-pemeliharaan-dokumen.html>
- Makassarmetro. 2017. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Makassar Capai 60 Persen.
<http://makassarmetro.com/2017/12/16/penanganan-kawasan-pemukiman-kumuh-kota-makassar-capai-60-persen/>
- Sindonews. 2013. 432.115 Warga Makassar Hidup di Permukiman Kumuh.
<https://daerah.sindonews.com/read/821882/25/432115-warga-makassar-hidup-di-pemukiman-kumuh-1388380263>
- Surat Keputusan Walikota Makasar No 050. 05/1341/ Kep/05/2014 Tentang Penetapan Lokasi Kumuh Kota Makassar Tahun Anggaran 2014

Surya, Batara dkk. 2018. Pengaruh Dan Efektivitas Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan (Lokasi Studi : Permukiman Kumuh Kelurahan Tallo Kota Makassar). *Jurnal Ekosistem*. Vol 18. No. 2

Yoana, dkk. 2017. Struktur Upacara Adat Perkawinan Peranakan Tionghoa di Teluknaga Tangerang. *Jurnal Rupa*. Vol. 02. No.02.

Skripsi

Muhajir, Syam. 2017. Identifikasi Kawasan Kumuh Dan Strategi Penanganannya Pada Permukiman Di Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene. Skripsi. Fakultas Sains dan Teknologi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Undang-undang

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana, Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan Dan Permukiman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Peraturan Walikota No 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Surat Keputusan Walikota Makasar No 050. 05/1341/ Kep/05/2014 Tentang Penetapan Lokasi Kumuh Kota Makassar Tahun Anggaran 2014

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman